DILEMA ETIKA GURU PAUD DALAM MENANGANI PERILAKU ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KELAS INKLUNSIF

Zahra Aulia[1], Hanan[2], Cika Khasanatul Laeli[3], Nur Khasanah[4]

[1,2,3,4]*Universitas Islam Negeri K.H Abdurahman Wahid Pekalongan*
Email : zahraaulia090707@gmail.com[1], hananafandi007@gmail.com[2], cikakhasanatullaeli@gmail.com[3], nur.khasanah@uingusdur.ac.id[4]

ABSTRACT

Within the inclusive education system, early childhood (PAUD) teachers bear a significant responsibility to embrace student diversity, particularly children with special needs (ABK). This research specifically examines the ethical dilemmas experienced by educators when managing the temperament of special needs children in mainstream classrooms, guided by Article 3 of the Indonesian Teachers' Code of Ethics. This moral conflict arises when teachers find themselves caught between the duty to maintain a calm learning environment and the obligation to safeguard the emotional stability and mental health of special needs children who are throwing tantrums or acting impulsively. To analyze this phenomenon, a descriptive qualitative approach was applied, positioning the researcher as the primary instrument. The main data were gathered through regular observations and in-depth dialogues with inclusive PAUD teachers in the Pekalongan region. The findings indicate that educators strive to implement the mandate of Article 3 of the Code of Ethics through persuasive, humanistic, and empathetic strategies without resorting to repressive measures such as shouting or physical contact. In this context, justice is interpreted as providing adaptive accommodations tailored to each individual rather than equal treatment. Nevertheless, the lack of specialized pedagogical insights into inclusive education and the complexity of classroom dynamics remain the greatest hurdles. This study concludes that it is vital to proportionally blend empathy with assertiveness, supported by harmonious coordination between schools and parents to foster a truly humane inclusive atmosphere.

Keywords : *Ethical Dilemma, PAUD Teachers, Children with Special Needs*

ABSTRAK

Dalam sistem pendidikan inklusif, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memegang tanggung jawab besar untuk merangkul pluralitas murid, khususnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Riset ini secara spesifik mengkaji pergolakan etis yang dialami para pendidik sewaktu mengendalikan temperamen ABK di ruang kelas umum dengan berpijak pada Pasal 3 Kode Etik Guru Indonesia. Konflik moral tersebut mengemuka tatkala guru terjebak di antara kewajiban mengondisikan ketenangan ruang belajar dan keharusan menjaga stabilitas emosi serta kesehatan mental ABK yang tengah tantrum atau bertindak impulsif. Guna membedah fenomena ini, metode kualitatif deskriptif diterapkan dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci di lapangan. Sumber data utama dihimpun melalui teknik pengamatan berkala serta dialog mendalam bersama guru-guru PAUD inklusi di daerah Pekalongan. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa para pengajar berikhtiar mengimplementasikan amanat Pasal 3 Kode Etik Guru melalui strategi persuasif, humanistik, dan penjiwaan empati tanpa melibatkan tindakan represif seperti bentakan maupun kontak fisik. Nilai keadilan di sini diartikan sebagai pemenuhan akomodasi yang adaptif bagi tiap individu, bukan penyetaraan perlakuan. Kendati begitu, minimnya wawasan pedagogis khusus inklusi serta rumitnya situasi kelas menjadi hambatan terbesar. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya memadukan empati dengan ketegasan secara proporsional, diiringi koordinasi yang harmonis antara institusi sekolah dan orang tua demi menciptakan iklim inklusi yang humanis.

Kata Kunci : *Dilema Etika, Guru PAUD, Anak Berkebutuhan Khusus, Kelas Inklusif*

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif kini telah menjadi standar global yang mewajibkan sekolah untuk terbuka bagi semua peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, mental, maupun intelektual. Kebijakan ini merupakan langkah transformatif untuk menghargai keberagaman di lingkungan sekolah umum. Pertumbuhan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia saat ini berkembang pesat, ditandai dengan masifnya pembukaan instansi baru di tingkat desa sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah. Pendidikan inklusif merupakan suatu orientasi berpikir yang berfokus pada penyediaan hak dan kesempatan belajar yang setara bagi setiap anak, salah satunya dengan menyatukan mereka dalam ruang kelas yang sama. Konsep ini diimplementasikan sebagai upaya nyata untuk menciptakan sistem pembelajaran yang ramah terhadap pluralitas serta bebas dari segala bentuk diskriminasi (Indiyanto et al., 2026).

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pemerataan akses, tetapi juga memicu persaingan kualitas antarlembaga dalam menawarkan program pembelajaran yang kompetitif. Berdasarkan payung hukum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, penyelenggaraan PAUD merupakan komitmen bersama antara negara dan masyarakat untuk membangun kesiapan belajar anak sebelum memasuki sekolah dasar. Menariknya, di tengah pergeseran sosial di mana banyak orang tua menjadi pekerja, institusi PAUD bertransformasi menjadi komoditas pemenuh kebutuhan yang adaptif melalui penyediaan fleksibilitas layanan, baik dalam bentuk *half-day school* maupun *full-day school*. Namun, transisi menuju sistem yang inklusif ini menempatkan guru pada garis depan yang penuh dengan tekanan profesional dan moral (Uswatun Nisa & Vera Wati, 2022).

Meskipun berbagai literatur ilmiah saat ini menunjukkan bahwa diskursus mengenai pendidikan inklusif telah berkembang menjadi tema kajian yang sangat luas di ranah global, perhatian akademis yang secara spesifik menyoroti peran *street-level bureaucracy*—yaitu para guru, kepala sekolah, serta jajaran administrasi sekolah sebagai garda terdepan (*frontliners*) dalam implementasi kebijakan—ternyata masih sangat terbatas dan jarang disentuh. Ketimpangan ini menciptakan jarak yang lebar antara narasi ideal sebuah regulasi dan realitas operasional di lapangan. Sebagai contoh di level kebijakan makro, negara seperti Nepal sebenarnya telah berhasil merumuskan dan memiliki kerangka hukum serta payung regulasi yang sangat kuat terkait sistem inklusi, namun kepemilikan aturan tersebut belum diimbangi dengan rencana aksi atau pedoman implementasi yang taktis dan operasional (Puri et al., 2024). Akibat dari lemahnya derivasi kebijakan makro ke tingkat praktis ini, hambatan-hambatan kontekstual dan kendala organisasional di internal institusi sekolah tetap menjadi sandungan besar yang menghambat efektivitas pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di tingkat akar rumput (Ratih et al., 2025).

Fase usia dini memegang peran krusial dalam membentuk fondasi perkembangan anak, di mana stimulasi yang diperoleh melalui PAUD akan sangat memengaruhi aspek kognitif, sosial, emosional, serta motorik mereka. Bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), tahapan awal ini menjadi momentum penentu yang memengaruhi keberhasilan mereka dalam menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Melalui penerapan sistem inklusi di tingkat PAUD, ABK memperoleh kesempatan emas untuk bersosialisasi dan belajar bersama anak-anak reguler dalam lingkungan yang suportif, adaptif, serta inklusif tanpa adanya sekat diskriminasi. Kendati demikian, realitas operasional pendidikan inklusif di jenjang PAUD masih menghadapi tantangan berat dalam praktiknya. Banyak institusi PAUD di Indonesia, khususnya yang berlokasi di daerah non-perkotaan atau memiliki keterbatasan fasilitas, belum didukung oleh layanan konseling khusus

maupun tenaga pendidik yang memiliki latar belakang kompetensi Pendidikan Luar Biasa (Kurnia et al., 2024).

Secara konseptual, ABK dipahami sebagai anak yang mengalami deviasi atau hambatan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan jika disandingkan dengan standar anak normal. Spektrum hambatan ini bervariasi, mulai dari kendala intelektual, fisik-motorik, gangguan perilaku, hambatan belajar dan berkomunikasi, penyakit kronis, hingga kondisi kedisabilitasan ganda (Hanifah et al., 2021). Menyadari adanya kesenjangan dengan kriteria anak pada umumnya, diperlukan suatu penyesuaian sistematis dalam ruang lingkup instruksional yang dikenal sebagai pendidikan khusus (*special education*). Atas dasar itulah, penyusunan strategi pembelajaran yang matang mutlak diperlukan untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Guru di sekolah wajib merancang persiapan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik unik dan kondisi objektif setiap anak, sehingga mereka dapat berinteraksi dan beradaptasi secara optimal dengan lingkungan sekitarnya (Utami et al., 2024).

Di lapangan, guru seringkali dihadapkan pada situasi di mana perilaku spesifik ABK, seperti hiperaktivitas atau tantrum, berbenturan dengan kepentingan siswa lain untuk belajar dalam suasana tenang. Di sinilah muncul urgensi pembahasan mengenai dilema etika: guru harus memutuskan tindakan yang tidak melanggar hak ABK namun tetap menjaga efektivitas pembelajaran. Pasal 3 Kode Etik Guru Indonesia telah memberikan mandat untuk menciptakan suasana pendidikan yang dialogis dan adil, namun aplikasinya dalam menangani perilaku ABK membutuhkan landasan etis yang kuat agar tidak terjadi malapraktik pendidikan. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana guru dapat menavigasi dilema tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan profesionalisme.

Pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar bersama peserta didik lain dalam lingkungan sekolah yang sama. ABK memiliki karakteristik dan kebutuhan yang beragam sehingga memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan tahap perkembangannya. Dalam proses pembelajaran, guru sering menghadapi perilaku tertentu pada ABK seperti tantrum, kesulitan mengikuti instruksi, perilaku impulsif, atau hambatan interaksi sosial yang memerlukan penanganan khusus.

Penanganan perilaku ABK di kelas menjadi bagian penting dalam tugas guru karena perilaku anak dapat memengaruhi proses pembelajaran dan suasana kelas. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu anak mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Oleh karena itu, keputusan guru dalam menangani perilaku anak harus mempertimbangkan kebutuhan individual anak sekaligus kenyamanan peserta didik lain .

Dalam situasi tersebut, guru sering menghadapi **dilema etika**. Dilema etika merupakan kondisi ketika seseorang harus memilih tindakan yang sama-sama memiliki konsekuensi moral. Dalam konteks pendidikan inklusif, dilema etika muncul ketika guru harus menentukan tindakan yang tepat terhadap perilaku ABK, misalnya antara menenangkan anak yang sedang tantrum atau menjaga agar proses belajar peserta didik lain tetap berlangsung dengan baik. Situasi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan guru tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan kelas, tetapi juga menyangkut pertimbangan moral dan profesional.

Landasan moral dalam menjalankan profesi guru diatur dalam **Kode Etik Guru Indonesia**. Kode etik berfungsi sebagai pedoman sikap dan perilaku guru agar pelaksanaan tugas pendidikan dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan menghormati peserta didik. Dalam penelitian ini, fokus utama terletak pada **Pasal 3 Kode Etik Guru Indonesia** yang

menegaskan bahwa guru berkewajiban membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, menghormati hak serta martabat peserta didik, dan menjalankan tugas secara profesional serta adil (Maulidya Ulfah, 2019).

Pasal 3 tersebut menjadi penting dalam penanganan perilaku ABK karena guru dituntut untuk tetap menghargai kondisi anak sekaligus menjaga lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Artinya, guru tidak hanya dituntut menyelesaikan masalah perilaku, tetapi juga memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak melanggar hak anak atau menimbulkan dampak psikologis negatif. Dengan demikian, keputusan guru dalam menghadapi perilaku ABK merupakan bagian dari implementasi kode etik profesi (Alafi et al., 2019).

Penerapan Pasal 3 Kode Etik Guru Indonesia dalam pendidikan inklusif umumnya terlihat melalui penggunaan pendekatan **persuasif** dan **humanis.** Pendekatan persuasif dilakukan melalui komunikasi yang mengajak dan membimbing anak tanpa paksaan, sedangkan pendekatan humanis menempatkan anak sebagai individu yang perlu dipahami, dihargai, dan didampingi sesuai kebutuhannya. Pendekatan ini relevan dengan situasi yang dialami guru ketika menghadapi perilaku ABK di kelas (Jumatul sakdiah et al., 2024).

Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian mengenai dilema etika guru dalam menangani perilaku ABK perlu dilakukan untuk memahami bagaimana guru mengambil keputusan dan menerapkan Pasal 3 Kode Etik Guru Indonesia dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Tinjauan literatur ini menjadi landasan bagi penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara guru sebagai sumber data utama untuk menggambarkan pengalaman dan pertimbangan etis yang muncul di kelas.

METODE

Sesuai dengan judul yang mengangkat tema Model Pembelajaran Inklusi, penelitian ini dijalankan melalui pendekatan kualitatif deskriptif (Indiyanto et al., 2026). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menggambarkan secara mendalam mengenai fenomena dilema etika yang dialami oleh guru PAUD dalam menangani perilaku Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di kelas inklusif. Melalui metode deskriptif, peneliti dapat menguraikan fakta-fakta lapangan terkait pergolakan batin dan pilihan dilematis guru antara menjaga ketertiban kelas dan melindungi hak psikologis anak secara naratif tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap subjek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*). Peneliti terlibat langsung dalam seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, analisis data, hingga pelaporan hasil akhir. Kehadiran peneliti di lapangan dilakukan dengan membangun hubungan yang baik (*rapport*) bersama para guru guna memperoleh data yang jujur, terbuka, dan alamiah mengenai dilema etika yang mereka hadapi.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK) yang menyelenggarakan program kelas inklusif di wilayah Pekalongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik sekolah yang memiliki siswa reguler sekaligus ABK dalam satu ruang kelas yang sama, serta guru-guru yang aktif berinteraksi langsung dengan dinamika perilaku anak berkebutuhan khusus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana mengenai konsep anak berkebutuhan khusus (ABK) telah lama menjadi perhatian dan didefinisikan secara variatif oleh berbagai pakar multidisiplin. Salah satu pandangan konseptual dari Suran dan Rizzo (1979) menjelaskan bahwa ABK merupakan kelompok anak yang mengalami hambatan tertentu, baik pada aspek perkembangan fisik, psikologis, kognitif-intelektual, maupun sosial, yang kemudian menyulitkan mereka untuk meraih capaian dan potensi dirinya secara maksimal. Spektrum hambatan ini mencakup gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, keterbatasan berbicara, retardasi mental, ketidakstabilan emosional, hingga kelainan fungsi tubuh, termasuk pula anak-anak dengan kecerdasan luar biasa (berbakat) yang dalam proses perkembangannya membutuhkan pendampingan khusus dari tenaga profesional. Selaras dengan hal tersebut, Mangunsong (2009) melalui karyanya mengenai psikologi dan pendidikan ABK turut menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah individu yang menunjukkan deviasi atau penyimpangan dari standar kenormalan anak-anak seusianya. Karakteristik abnormalitas ini dapat diidentifikasi lewat indikator kapasitas mental, fungsi fisik-sensorik, dinamika perilaku sosial-emosional, hingga keterbatasan dalam kecakapan berbicara dan berkomunikasi, di mana seluruh aspek tersebut pada akhirnya menuntut adanya modifikasi dan penyesuaian khusus dalam pemenuhan kebutuhan belajar mereka di sekolah (Uswatun Nisa & Vera Wati, 2022).

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa guru sering menghadapi dilema etika dalam menangani perilaku anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas. Dilema ini muncul ketika guru harus memenuhi kebutuhan individual anak sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan seluruh peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perilaku ABK bukan hanya persoalan teknis pembelajaran, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan profesional guru.

Hasil observasi memperlihatkan bahwa perilaku seperti tantrum, menolak instruksi, atau mengganggu teman menjadi perilaku yang paling sering memunculkan dilema etika. Guru harus mengambil keputusan dengan cepat agar perilaku anak tidak mengganggu proses belajar maupun membahayakan teman kelasnya. Namun, dalam mengambil tindakan guru tetap berusaha menjaga kondisi emosional anak agar tidak merasa tertekan atau ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa guru berupaya menjalankan perannya sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Guru Indonesia yang menekankan sikap profesional, penghormatan terhadap peserta didik, dan tanggung jawab dalam proses pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, cara guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus dengan cara membujuk,mengajak tidak hanya membujuk dan mengajak guru juga memberikan empati agar anak tidak merasa di paksa. hal tersebut menunjukkan bahwa guru memandang anak berkebutuhan khusus sebagai individu yang memerlukan pendampingan dan pemahaman, bukan sekadar pengendalian perilaku. Dengan demikian, penerapan disiplin di kelas dilakukan dengan tetap memperhatikan hak dan kebutuhan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, guru menyampaikan bahwa disekolah tersebut sering menghadapi dilema etika dalam menangani perilaku anak berkebutuhan khusus di kelas. Dilema tersebut muncul ketika guru harus menjaga kenyamanan di dalam kelas, namun pada saat yang sama tetap menghormati kebutuhan serta kondisi anak sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Guru Indonesia yang menekankan sikap profesional, adil, dan penuh tanggung jawab terhadap peserta didik.

Guru kelas menyampaikan bahwa perilaku tantrum dan kesulitan mengendalikan emosi menjadi situasi yang cukup sering ditemui selama kegiatan belajar berlangsung. Guru harus mengambil keputusan secara cepat agar anak dapat ditenangkan tanpa menimbulkan rasa takut atau tertekan. Guru kelas Menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan tidak mengarah pada hukuman fisik ataupun bentakan. Menurutnya, anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendampingan yang lebih sabar dan cara komunikasi yang menenangkan agar perilaku mereka mudah diarahkan.

Guru kelas mengungkapkan bahwa dilema sering muncul ketika perilaku anak mulai memengaruhi teman sekelas. Dalam beberapa situasi, guru harus melindungi anak lain tetapi tetap menjaga perasaan anak yang sedang mengalami kesulitan mengontrol perilaku. Selain menghadapi perilaku anak di kelas, guru juga mengaku sering mengalami tantangan dalam memahami kebutuhan setiap anak karena tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan khusus mengenai anak berkebutuhan khusus. Sebagian guru belajar melalui pengalaman mengajar sehari-hari.

Guru juga menjelaskan bahwa kerja sama dengan orang tua memiliki peran penting dalam membantu guru menangani perilaku anak secara konsisten. Guru menyampaikan bahwa komunikasi antara guru dan orang tua harus dilakukan,tujuannya agar dapat membantu memahami kondisi serta kebutuhan anak dengan lebih tepat.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa dilema etika guru dalam menangani perilaku anak berkebutuhan khusus tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan kelas, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan profesional guru dalam memberikan perlakuan yang adil, aman, dan menghargai kebutuhan setiap anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa guru memaknai keadilan sebagai pemberian perhatian yang sesuai dengan kebutuhan anak, bukan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta didik. Di jelaskan kepada guru bahwa guru kelas memberikan pendekatan yang berbeda kepada ABK sesuai kondisi dan kemampuan mereka. Pada hal ini memperlihatkan bahwa konsep keadilan dalam pendidikan inklusif lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan belajar setiap anak agar memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.

Di sisi lain, hasil penelitian menemukan bahwa keterbatasan pengetahuan dan pengalaman guru masih menjadi tantangan dalam menangani perilaku ABK. Sebagian guru mengaku belum memperoleh pelatihan khusus sehingga terkadang merasa ragu dalam menentukan tindakan yang tepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kode etik guru memerlukan dukungan kompetensi profesional agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pengalaman pribadi, tetapi juga pemahaman pedagogis yang memadai.

Selain itu, komunikasi antara guru dan orang tua menjadi faktor penting dalam mendukung penanganan perilaku anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama yang baik membantu guru memahami karakter dan kebutuhan anak sehingga strategi pendampingan dapat dilakukan secara lebih konsisten antara rumah dan sekolah. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat memperbesar kesulitan yang dihadapi guru dalam mengelola perilaku anak di kelas.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa dilema etika guru dalam menangani perilaku anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari realitas pendidikan inklusif. Guru berupaya menjalankan Pasal 3 Kode Etik Guru Indonesia melalui pendekatan yang menghargai hak anak dan menjaga suasana belajar yang kondusif, meskipun masih menghadapi keterbatasan pengetahuan, situasi kelas yang kompleks, serta perlunya dukungan dari orang tua dan sekolah.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa guru menghadapi dilema etika dalam menangani perilaku anak berkebutuhan khusus (ABK) di kelas karena harus menyeimbangkan kebutuhan individual anak dengan tanggung jawab menjaga proses pembelajaran yang aman dan kondusif. Situasi seperti tantrum, sulit mengikuti instruksi, dan perilaku yang mengganggu teman sering menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani perilaku ABK. Guru berusaha membimbing dan menenangkan anak melalui komunikasi yang lembut serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan tekanan psikologis. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya guru dalam menerapkan Pasal 3 Kode Etik Guru Indonesia yang menekankan sikap profesional, adil, dan menghargai peserta didik.

Namun demikian, pelaksanaan penanganan perilaku ABK masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pengetahuan guru, kondisi kelas yang beragam, serta perlunya kerja sama yang lebih baik dengan orang tua. Oleh karena itu, dukungan berupa pelatihan dan penguatan komunikasi antara sekolah dan keluarga diperlukan agar penanganan perilaku anak dapat dilakukan secara lebih optimal dan sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Alafi, M. F., Huda, M., Andani, U. E., Seruni, C. I., & Putri, D. F. (2019). Pelanggaran Kode Etik Psikologi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Salah Satu Sekolah Inklusif Depok Jawa Barat. *Journal Information*, *10*(3), 1–16.

Indiyanto, A. S., Anak, P., Dini, U., Universitas, P., & Makassar, N. (2026). *JURNAL INDOPEDIA (Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan) MODEL PEMBELAJARAN INKLUSI PADA ANAK INCLUSION LEARNING MODEL IN EARLY CHILDHOOD*

Jumatul sakdiah, Nana Marsiana, & Opi Andriani. (2024). Membangun Konsep Diri Anak Berkebutuhan Khusus. *Perspektif : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, *2*(1), 145–150. https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i1.1015

Maulidya Ulfah. (2019). Upaya Merancang Paud Di Masa Depan Untuk Mengatasi Problematika Yang Kompeks. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Ratih, R., Koeswara, H., Kasmira, A., & Zein, S. S. (2025). Diskresi Aktor Street Level Bureaucrat Pada Implementasi Pendidikan Inklusif Tk-Smp Di Kota Padang. *Responsive*, *8*(4), 601–614. https://doi.org/10.24198/responsive.v8i4.67571

Uswatun Nisa, & Vera Wati. (2022). Dilema Guru PAUD Inklusi Terhadap Kompleksitas ABK: Antara Tantangan dan Keniscayaan. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, *3*(2), 16–27. https://doi.org/10.19105/kiddo.v3i2.6603

Utami, T. S., Putri, A. A. P., Badriyah, L., & Rafizah, N. (2024). Peran Guru Paud dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Aulad: Journal on Early Childhood*, *8*(3), 1308–1317. https://doi.org/10.31004/aulad.v8i3.1376

Maharani Devi, S., & Ismail, H. (2024). Analisis Pelaksanaan Pengentasan Keluarga Miskin Dalam Perspektif Street Level Birokrasi (Studi Pengetasan Keluarga Miskin di Kelurahan Wonorejo Tegalsari). Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4(01). https://surabayakota.bps.go.id/

Hanifah, D. S., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, M. B. (2021). Dalam Menjalani Pendidikan

Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 2(3), 473–483.

Khayati, N. A., Muna, F., Oktaviani, E. D., & Hidayatullah, A. F. (2020). Peranan Guru Dalam Pendidikan Inklusif Untuk Pencapaian Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Jurnal Komunikasi Pendidikan, 4(1), 55–61.

Kurnia, I. R., Damayanti, A., Sekarwangi, D. P., & Khoerunnissa, V. (2024). Peran Guru Dalam Mendukung Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Di Kelas: Sebuah Tinjauan Literatur. Didaktik: Jurnal Ilmia PGSD FKIP Universitas Mandiri, 10(4).